



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2019 NOMOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan terjadinya pergeseran kewenangan urusan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi yang berpengaruh terhadap jenis-jenis obyek retribusi daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa tarif retribusi dapat disesuaikan dengan indeks harga, tingkat perkembangan ekonomi dan pembangunan;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan pembebasan terhadap biaya administrasi dokumen kependudukan, maka perlu menghapus retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DAN

BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab I Pasal 1 diubah dan ditambah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang ditunjuk oleh Bupati;
6. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
8. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan monologam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
12. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung sampah dari masyarakat yang bersifat sementara.
13. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menimbun sampah untuk terakhir kali yang berasal dari tempat pembuangan sementara.
14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang bersifat sementara.
15. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan.
16. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
17. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli sebagai ajang transaksi jual beli yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan bentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
18. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman/pelataran, los yang dikelola oleh

- Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD pasar).
19. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
 20. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
 21. Pengujian kendaraan bermotor adalah rangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
 22. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai informasi suatu kegiatan/tema tertentu.
 23. Cetak peta adalah kegiatan menggandakan, memperbanyak, mencetak ulang, merekalkir dan merekam peta/gambar/desain bangunan.
 24. Alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya di singkat UTTP adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kualitas untuk kepentingan umum, kepentingan usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan;
 25. Pengujian UTTP adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai berhak untuk membandingkan UTTP dengan standar;
 26. Pegawai Berhak adalah pegawai yang diberi tugas dan hak untuk melakukan pengujian UTTP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 27. Layak pakai adalah suatu kondisi teknis dari UTTP yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku;
 28. Pengendalian menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian.
 29. Pelayanan pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
 30. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
 31. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan;
 32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
 34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 37. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 38. Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berbentuk cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
2. Ketentuan Pasal 2 angka 3 dihapus dan ditambah 3 (tiga) angka yaitu angka 11, 12 dan 13 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 3. Dihapus;
 4. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
 5. Retribusi Pelayanan Pasar;
 6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 8. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 9. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
 10. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 11. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 12. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
 13. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair.
3. Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Polindes/poskesdes, Balai Pengobatan, dan Pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan Pendaftaran Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

4. Ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Selain jenis-jenis pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Pustu, Polindes/Poskesdes dan Balai Pengobatan lainnya yang dapat dikenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Klasifikasinya :

- (1) Rawat Jalan;
- (2) Rawat Darurat;
- (3) Rawat Inap;

b. Berdasarkan Jenis Pelayanan :

- (1) Pelayanan Medis;
- (2) Pelayanan Penunjang Medis;
- (3) Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi;
- (4) Pelayanan Penunjang Non Medis;
- (5) Pelayanan Rehabilitasi Medis;
- (6) Pelayanan Medis Gigi dan Mulut;
- (7) Pelayanan Konsultasi khusus;
- (8) Pelayanan Medico Legal;
- (9) Pemulasaran / Perawatan Jenazah.

5. Ketentuan Bab V Pasal 21 sampai dengan Pasal 47 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut :

| No | Jenis Kendaraan Bermotor | Tarif (Rp) |
|----|--|-----------------------|
| 1 | Bus, Truk dan Alat Berat lainnya | 5.000,-/sekali parkir |
| 2 | Sedan, Jeep, Mini Bus, Pickup dan sejenisnya | 3.000,-/sekali parkir |
| 3 | Sepeda Motor | 2.000,-/sekali parkir |

7. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut:

| No | Obyek | Tarif /m ² / hari (Rp) | |
|----|---------------------|-----------------------------------|---------|
| | | Tipe A | Tipe B |
| 1 | Los Pasar | 2.000,- | 1.500,- |
| 2 | Halaman / Pelataran | 1.500,- | 1.000,- |
| 3 | Lingkungan Pasar | 1.000,- | 500,- |

Setiap orang/badan yang memakai bangunan pasar untuk menempatkan barangnya secara menetap dalam pasar, selain membayar retribusi juga dikenakan tarif sebagai berikut :

- a. Tipe A sebesar Rp. 2.000/m²/bulan
- b. Tipe B sebesar Rp. 1.500/m²/bulan

8. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

9. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang akan diuji harus dibawa ketempat pengujian.
- (2) Apabila kendaraan bermotor akan diuji diluar wilayah domisilinya/numpang uji, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Permohonan tertulis;
 - b) Memiliki tanda bukti lulus uji yang lama dari daerah asal;
 - c) Membayar biaya uji berkala;
 - d) Foto copy STNK;
 - e) Foto copy identitas pemilik;
 - f) Membawa rekomendasi dari tempat uji pertama sesuai domisili kendaraan tersebut.
- (3) Setelah pengujian diizinkan, pejabat harus menyampaikan hasil uji berkala dimana kendaraan tersebut berdomisili;
- (4) Pemilik/pemegang kendaraan bermotor wajib uji yang bermaksud untuk memindahkan/mutasi uji, ubah sifat dan ganti mesin harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Dinas Perhubungan.

10. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dihapus bukukan berdasarkan hasil penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Sebagai bukti hasil penilaian teknis kendaraan bermotor dibuatkan surat keterangan dan berita acara.

11. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

Tingkat penggunaan jasa pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dihitung berdasarkan jumlah personil, biaya perjalanan dan kebutuhan lainnya dalam melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan.

12. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

13. Diantara Bab XII dan Bab XIII disisipkan 3 (tiga) Bab yaitu Bab XIII A, Bab XIII B dan Bab XIII C sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII A

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Nama Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 119A

- (1) Dengan Nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Obyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 119B

- (1) Subyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut/pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua

Pemeriksaan dan penilaian teknis

Pasal 119C

- (1) Setiap alat pemadam kebakaran yang dipakai harus memenuhi persyaratan setelah melalui pemeriksaan dan penilaian teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan pertama dan/atau pemeriksaan berkala.

Pasal 119D

- (1) Pemeriksaan pertama alat pemadam kebakaran adalah pelaksanaan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang baru dan atau belum pernah diuji.
- (2) Pemeriksaan berkala dilakukan terhadap alat pemadam kebakaran yang sudah pernah diperiksa.

- (3) Masa pemeriksaan berkala didasarkan pada konstruksi, pembuatan, frekuensi pemakaian normal dan karakteristik alat pemadam kebakaran.
- (4) Masa pemeriksaan berkala berlaku 1 (satu) tahun.

Pasal 119E

- (1) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 119D ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa pemeriksaan berkala.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 119F

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus pemeriksaan berkala alat pemadam kebakaran dibubuhi atau dipasang tanda layak pakai.
- (2) Tanda layak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlaku dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 119G

- (1) Pemeriksaan pertama dan berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 119D ayat (2) harus dilakukan oleh Pegawai yang berwenang.
- (2) Pegawai yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai berwenang dalam melakukan pemeriksaan.

Pasal 119H

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan berkala dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pemeriksaan.
- (2) Fasilitas dan peralatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan teknis.
- (3) Tata cara pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Golongan Retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 119I

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 119J

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dihitung berdasarkan jenis/tipe alat pemadam kebakaran.

Bagian Kelima

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 119K

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi adalah untuk menutup sebagian biaya administrasi dan operasional penyediaan dan/atau pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Bagian Keenam

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 119L

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB XIIB

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 119M

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Obyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 119N

- (1) Subyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut/pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 119O

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 119P

Tingkat penggunaan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dihitung berdasarkan lokasi dan volume.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 119Q

- (1) Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan alat.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 119R

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut :

| No | Obyek | Tarif / m ³ (Rp) | | |
|----|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Jarak < 15 Km | Jarak 16 - 30 Km | Jarak > 30 Km |
| 1 | Rumah Tangga | Rp. 100.000/m ³ | Rp. 120.000/m ³ | Rp.140.000/m ³ |
| 2 | Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial | Rp. 75.000/m ³ | Rp. 95.000/m ³ | Rp. 115.000/m ³ |
| 3 | Perusahaan | Rp. 200.000/m ³ | Rp. 240.000/m ³ | Rp. 280.000/m ³ |

BAB XIIC

RETRIBUSI PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 119S

- (1) Dengan nama Retribusi Pengelolaan Limbah Cair dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengelolaan limbah cair.
- (2) Obyek Retribusi Pengelolaan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

Pasal 119T

- (1) Subyek Retribusi Pengelolaan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan pengelolaan limbah cair.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut/pemotong Retribusi Pengelolaan Limbah Cair.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 119U

Retribusi Pengelolaan Limbah Cair digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 119V

Tingkat penggunaan jasa pengelolaan limbah cair dihitung berdasarkan jumlah sambungan dan volume.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 119W

- (1) Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan pengelolaan limbah cair dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan alat.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 119X

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengelolaan Limbah Cair ditetapkan sebagai berikut :

| No | Uraian | Tarif (Rp) | Keterangan |
|----|--|------------|--------------------|
| 1 | Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) | | |
| | a. Perumahan | 3.000 | Persambungan |
| | b. Usaha Kecil | 5.000 | Persambungan |
| | c. Perusahaan Menengah/Besar | 20.000 | Persambungan |
| | d. Fasilitas Sosial/Fasilitas Umum | 2.000 | Persambungan |
| 2 | Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | 15.000 | Per m ³ |

14. Diantara Bab XIX dan Bab XX disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab XIXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIXA

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 130A

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
 - (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
15. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
 16. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.
 17. Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal

BUPATI LOMBOK TENGAH,

TTD

H. MOH. SUHAILI FT.

Diundangkan di Praya

pada tanggal , 11 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



H. NURSIAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH : 37 TAHUN
2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. MUTAWALLI, SH
NIP.196412311992031196

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakibatkan terjadinya pergeseran kewenangan urusan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi yang berpengaruh terhadap jenis-jenis obyek retribusi daerah dan sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, tarif retribusi dapat disesuaikan dengan indeks harga, tingkat perkembangan ekonomi dan pembangunan.

Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Adiministrasi Kependudukan pada Pasal 79A berbunyi: "pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya" dengan demikian pemerintah daerah, Kecamatan dan pemerintah desa tidak diperkenankan untuk memungut biaya penerbitan dokumen kependudukan sehingga objek retribusi yang diatur dalam Perda 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum harus dicabut.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 17 November 2017 tentang pembatalan penjelasan pasal 124 Undang-Undang 29 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu mengenai pengendalian menara telekomunikasi 2% dari biaya pembangunan sehingga besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi perlu disesuaikan dengan biaya pengendalian dan pengawasan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum berdasarkan evaluasi bahwa diperlukan mengadakan perubahan agar dapat mendukung kepentingan dan kemanfaatan umum serta pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

| NO | UNIT PELAYANAN | URAIAN | TARIF | PROPORSI PENGGUNAAN | | |
|----|--------------------------|--|------------|---------------------|----------------|-------------|
| | | | | BAHAN HABIS PAKAI | JASA PELAYANAN | JASA SARANA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KUNJUNGAN PUSKESMAS | - KUNJUNGAN PUSKESMAS | Rp 10.000 | Rp 3.500 | Rp 4.000 | Rp 2.500 |
| | | - KUNJUNGAN PUSKESMAS PEMBANTU | Rp 8.000 | Rp 2.800 | Rp 3.200 | Rp 2.000 |
| | | - KUNJUNGAN PUSKESMAS KELILING | Rp 8.000 | Rp 2.800 | Rp 3.200 | Rp 2.000 |
| | | - KUNJUNGAN POSKESDES | Rp 8.000 | Rp 2.800 | Rp 3.200 | Rp 2.000 |
| | | - SURAT KETERANGAN DOKTER (BERBADAN SEHAT) | Rp 10.000 | Rp 3.500 | Rp 4.000 | Rp 2.500 |
| 2 | UNIT GAWAT DARURAT (UGD) | - KUNJUNGAN UGD (TANPA TINDAKAN) | Rp 15.000 | Rp 5.250 | Rp 6.000 | Rp 3.750 |
| | | - DEBRIDEMEN / LUKA | Rp 10.000 | Rp 3.500 | Rp 4.000 | Rp 2.500 |
| | | - LUKA LIMA JAHITAN PERTAMA | Rp 15.000 | Rp 5.250 | Rp 6.000 | Rp 3.750 |
| | | - LUKA JAHITAN SELANJUTNYA | Rp 3.000 | Rp 1.050 | Rp 1.200 | Rp 750 |
| | | - O2 PERJAM | Rp 25.000 | Rp 15.000 | Rp 10.000 | Rp - |
| | | - PEMASANGAN KATETER | Rp 15.000 | Rp 5.250 | Rp 6.000 | Rp 3.750 |
| | | - NEBULIZER | Rp 25.000 | Rp 8.750 | Rp 10.000 | Rp 6.250 |
| | | - SPALK | Rp 25.000 | Rp 8.750 | Rp 10.000 | Rp 6.250 |
| | | - PEMASANGAN INFUS | Rp 5.000 | Rp 1.750 | Rp 2.000 | Rp 1.250 |
| | | - CORPS ALENUM TELINGA, HIDUNG, MATA | Rp 15.000 | Rp 5.250 | Rp 6.000 | Rp 3.750 |
| | | - EKSTRAKSI KUKU | Rp 10.000 | Rp 3.500 | Rp 4.000 | Rp 2.500 |
| | | - OBSERPASI | Rp 15.000 | Rp 5.250 | Rp 6.000 | Rp 3.750 |
| | | - UP HEACTING DIBAWAH LIMA | Rp 4.000 | Rp 1.400 | Rp 1.600 | Rp 1.000 |
| | | - UP HEACTING DIATAS LIMA | Rp 1.000 | Rp 350 | Rp 400 | Rp 250 |
| | | - NGT | Rp 15.000 | Rp 5.250 | Rp 6.000 | Rp 3.750 |
| | | - INSISI | Rp 20.000 | Rp 7.000 | Rp 8.000 | Rp 5.000 |
| | | - EKG | Rp 50.000 | Rp 17.500 | Rp 20.000 | Rp 12.500 |
| 3 | KEBIDANAN | - ANC PERTAMA | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - |
| | | - PEMERIKSAAN KEBIDANAN TANPA KEHAMILAN | Rp 10.000 | Rp 3.500 | Rp 4.000 | Rp 2.500 |
| | | - PEMASANGAN / PELEPASAN IMPLAN | Rp 30.000 | Rp 10.500 | Rp 12.000 | Rp 7.500 |
| | | - PEMASANGAN IUD | Rp 30.000 | Rp 10.500 | Rp 12.000 | Rp 7.500 |
| | | - PERSALINAN NORMAL DI POLINDES | Rp 400.000 | Rp 140.000 | Rp 160.000 | Rp 100.000 |
| | | - PERSALINAN NORMAL DI PUSKESMAS | Rp 400.000 | Rp 140.000 | Rp 160.000 | Rp 100.000 |
| | | - PERSALINAN DENGAN PENYULIT | Rp 600.000 | Rp 210.000 | Rp 240.000 | Rp 150.000 |
| | | - TINDAKAN CURET ABORTUS | Rp 500.000 | Rp 175.000 | Rp 200.000 | Rp 125.000 |
| | | - PELAYANAN PERSALINAN TAK MAJU DAN ATAU PELAYANAN PRA RUJUKAN BAYI BARU LAHIR DENGAN KOMPLIKASI | Rp 150.000 | Rp 52.500 | Rp 60.000 | Rp 37.500 |
| | | - TINDAKAN IVA DENGAN KRIOTRAPI | Rp 125.000 | Rp 43.750 | Rp 50.000 | Rp 31.250 |
| | | - TINDAKAN IVA TANPA KRIOTRAPI | Rp 25.000 | Rp 8.750 | Rp 10.000 | Rp 6.250 |
| | | - TINDIK | Rp 10.000 | Rp 3.500 | Rp 4.000 | Rp 2.500 |
| 4 | RAWAT INAP | - RAWAT INAP KELAS III BLOOD | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - |
| | | - RAWAT INAP KELAS III NON BLOOD | Rp 50.000 | Rp 37.500 | Rp - | Rp 12.500 |
| | | - VISITE DOKTER | Rp 10.000 | Rp 3.500 | Rp 4.000 | Rp 2.500 |
| | | - VITAL SIGN | Rp 24.000 | Rp 8.400 | Rp 9.600 | Rp 6.000 |
| | | - INJEKSI | Rp 5.000 | Rp 1.750 | Rp 2.000 | Rp 1.250 |
| | | - UP INFUS | Rp 5.000 | Rp 1.750 | Rp 2.000 | Rp 1.250 |
| | | - GANTI INPUS | Rp 3.000 | Rp 1.050 | Rp 1.200 | Rp 750 |
| | | - PEMBERIAN OBAT ORAL | Rp 2.000 | Rp 700 | Rp 800 | Rp 500 |
| | | - RAWAT INAP DI PUSKESMAS KELAS II | | | | |
| 5 | LABORATORIUM | - PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH | Rp 10.000 | Rp 3.500 | Rp 4.000 | Rp 2.500 |
| | | - PEMERIKSAAN DARAH RUTIN | Rp 13.500 | Rp 4.725 | Rp 5.400 | Rp 3.375 |
| | | - PEMERIKSAAN KEHAMILAN (BIO STREEP) | Rp 10.000 | Rp 5.000 | Rp 2.500 | Rp 2.500 |
| | | - PEMERIKSAAN PACES LENGKAP (FL) | Rp 15.000 | Rp 9.000 | Rp 3.500 | Rp 2.500 |
| | | - PEMERIKSAAN URIN LENGKAP (UL) | Rp 15.000 | Rp 7.500 | Rp 5.000 | Rp 2.500 |
| | | - PEMERIKSAAN WIDAL | Rp 20.000 | Rp 12.000 | Rp 5.000 | Rp 3.000 |
| | | - PEMERIKSAAN TROMBOSIT | Rp 10.000 | Rp 5.000 | Rp 2.500 | Rp 2.500 |
| | | - PEMERIKSAAN GULA DARAH SEWAKTU | Rp 13.500 | Rp 4.725 | Rp 5.400 | Rp 3.375 |
| | | - PEMERIKSAAN GULA DARAH PUASA | Rp 13.500 | Rp 4.725 | Rp 5.400 | Rp 3.375 |
| | | - PEMERIKSAAN GULA DARAH 2 PP | Rp 13.500 | Rp 4.725 | Rp 5.400 | Rp 3.375 |
| | | - CHOLESTROL | Rp 18.500 | Rp 13.500 | Rp 2.500 | Rp 2.500 |
| | | - BILIRUBIN DIRECT TOTAL | Rp 20.000 | Rp 15.000 | Rp 2.500 | Rp 2.500 |
| | | - SGOT | Rp 35.000 | Rp 27.500 | Rp 5.000 | Rp 2.500 |
| | | - SGPT | Rp 35.000 | Rp 27.500 | Rp 5.000 | Rp 2.500 |
| | | - UREUM | Rp 20.000 | Rp 12.500 | Rp 5.000 | Rp 2.500 |
| | | - CREATININ | Rp 25.000 | Rp 17.500 | Rp 5.000 | Rp 2.500 |
| | | - TOTAL PROTEIN | Rp 35.000 | Rp 27.500 | Rp 5.000 | Rp 2.500 |
| | | - GLOBULIN GAMA | Rp 30.000 | Rp 22.500 | Rp 5.000 | Rp 2.500 |
| | | - ALKALI FOSFAT | Rp 30.000 | Rp 22.500 | Rp 5.000 | Rp 2.500 |
| | | - TRIGLISERIDA | Rp 20.000 | Rp 15.000 | Rp 2.500 | Rp 2.500 |
| | | - HBSag | Rp 20.000 | Rp 12.500 | Rp 5.000 | Rp 2.500 |
| | | - PEMERIKSAAN HEMATOKRIT | Rp 35.000 | Rp 27.500 | Rp 5.000 | Rp 2.500 |
| | | - PEMERIKSAAN DARAH MALARIA | Rp 40.000 | Rp 35.000 | Rp 2.500 | Rp 2.500 |
| | | - PEMERIKSAAN SPUTUM BTA | Rp 25.000 | Rp 15.000 | Rp 2.500 | Rp 7.500 |
| | | - PEMERIKSAAN BAKTERI UNTUK SCKERIT VAGINA | Rp 35.000 | Rp 25.000 | Rp 7.500 | Rp 2.500 |
| | | - DANGUE TEST | Rp 85.000 | Rp 77.500 | Rp 5.000 | Rp 2.500 |
| | | - DL AUTOATIK | Rp 30.000 | Rp 25.000 | Rp 2.500 | Rp 2.500 |
| | | - HDL | Rp 30.000 | Rp 25.000 | Rp 2.500 | Rp 2.500 |
| | | - LDL | Rp 45.000 | Rp 40.000 | Rp 2.500 | Rp 2.500 |
| 6 | RUJUKAN | - RUJUKAN | | | | |
| | | 1. BUNJERUK | Rp 136.500 | Rp 54.600 | Rp 61.425 | Rp 20.475 |
| | | 2. PRINGGARATA | Rp 210.000 | Rp 84.000 | Rp 94.500 | Rp 31.500 |
| | | 3. TERATAK | Rp 220.500 | Rp 88.200 | Rp 99.225 | Rp 33.075 |
| | | 4. PRAYA | Rp 112.500 | Rp 45.000 | Rp 50.625 | Rp 16.875 |
| | | 5. AIKMUAL | Rp 112.500 | Rp 45.000 | Rp 50.625 | Rp 16.875 |
| | | 6. DAREK | Rp 178.500 | Rp 71.400 | Rp 80.325 | Rp 26.775 |
| | | 7. MUJUR | Rp 147.000 | Rp 58.800 | Rp 66.150 | Rp 22.050 |
| | | 8. GANTI | Rp 178.500 | Rp 71.400 | Rp 80.325 | Rp 26.775 |
| | | 9. JANAPRIA | Rp 241.500 | Rp 96.600 | Rp 108.675 | Rp 36.225 |
| | | 10. SENGKOL | Rp 210.000 | Rp 84.000 | Rp 94.500 | Rp 31.500 |
| | | 11. KUTA | Rp 304.500 | Rp 121.800 | Rp 137.025 | Rp 45.675 |
| | | 12. MANGKUNG | Rp 199.500 | Rp 79.800 | Rp 89.775 | Rp 29.925 |
| | | 13. BATUNYALA | Rp 112.500 | Rp 45.000 | Rp 50.625 | Rp 16.875 |
| | | 14. PENGADANG | Rp 112.500 | Rp 45.000 | Rp 50.625 | Rp 16.875 |
| | | 15. LANGKO | Rp 178.500 | Rp 71.400 | Rp 80.325 | Rp 26.775 |
| | | 16. PENUJAK | Rp 148.500 | Rp 59.400 | Rp 66.825 | Rp 22.275 |
| | | 17. PUYUNG | Rp 112.500 | Rp 45.000 | Rp 50.625 | Rp 16.875 |
| | | 18. UBUNG | Rp 136.500 | Rp 54.600 | Rp 61.425 | Rp 20.475 |
| | | 19. KOPANG | Rp 147.000 | Rp 58.800 | Rp 66.150 | Rp 22.050 |
| | | 20. MANTANG | Rp 147.000 | Rp 58.800 | Rp 66.150 | Rp 22.050 |
| | | 21. MUNCAN | Rp 112.500 | Rp 45.000 | Rp 50.625 | Rp 16.875 |
| | | 22. TERUWAI | Rp 210.000 | Rp 84.000 | Rp 94.500 | Rp 31.500 |
| | | 23. BAGU | Rp 210.000 | Rp 84.000 | Rp 94.500 | Rp 31.500 |
| | | 24. BATUJANGKIH | Rp 294.000 | Rp 117.600 | Rp 132.300 | Rp 44.100 |
| | | 25. AIK DAREK | Rp 210.000 | Rp 84.000 | Rp 94.500 | Rp 31.500 |
| | | 26. TANAK BEAK | Rp 210.000 | Rp 84.000 | Rp 94.500 | Rp 31.500 |
| | | 27. WAJA GESENG | Rp 285.000 | Rp 114.000 | Rp 128.250 | Rp 42.750 |
| | | 28. BATU JAI | Rp 112.500 | Rp 45.000 | Rp 50.625 | Rp 16.875 |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|--------------|------------|--------------|------------|
| 7 | POLI GIGI | - TUMPATAN SEMENTARA | Rp 20.000 | Rp 7.000 | Rp 8.000 | Rp 5.000 |
| | | - TUMPATAN TETAP GI | Rp 40.000 | Rp 14.000 | Rp 16.000 | Rp 10.000 |
| | | - TUMPATAN TETAP KOMPOSIT | Rp 75.000 | Rp 26.250 | Rp 30.000 | Rp 18.750 |
| | | - PEMBERSIHAN KARANG GIGI PER REGIO | Rp 13.000 | Rp 4.550 | Rp 5.200 | Rp 3.250 |
| | | - INSISI ABSES | Rp 22.000 | Rp 7.700 | Rp 8.800 | Rp 5.500 |
| | | - PENCABUTAN GIGI SULUNG | Rp 20.000 | Rp 7.000 | Rp 8.000 | Rp 5.000 |
| | | - PENCABUTAN GIGI PERMANEN | Rp 35.000 | Rp 12.250 | Rp 14.000 | Rp 8.750 |
| | | - OPERCULEKTOMI | Rp 20.000 | Rp 7.000 | Rp 8.000 | Rp 5.000 |
| | | - PENANGANAN DRY SOCKET | Rp 20.000 | Rp 7.000 | Rp 8.000 | Rp 5.000 |
| | | - TREPANASI PULPA | Rp 15.000 | Rp 5.250 | Rp 6.000 | Rp 3.750 |
| 8 | REHABILITASI MEDIK | - MASSAGE | Rp 13.500 | Rp 2.700 | Rp 6.750 | Rp 4.050 |
| | | - TRAKSI | Rp 13.500 | Rp 2.700 | Rp 6.750 | Rp 4.050 |
| | | - SWD | Rp 22.500 | Rp 4.500 | Rp 11.250 | Rp 6.750 |
| | | - INFRA MERAH | Rp 13.500 | Rp 2.700 | Rp 6.750 | Rp 4.050 |
| | | - SPECH TX | Rp 18.000 | Rp 3.600 | Rp 9.000 | Rp 5.400 |
| | | - PARADISASI | Rp 13.500 | Rp 2.700 | Rp 6.750 | Rp 4.050 |
| | | - POST DRAINAGE | Rp 13.500 | Rp 2.700 | Rp 6.750 | Rp 4.050 |
| | | - GENER EXERLISE | Rp 18.000 | Rp 3.600 | Rp 9.000 | Rp 5.400 |
| 9 | TINDAKAN MEDIS OPERATIF | - SEDERHANA (L/POMA) | Rp 25.000 | Rp 4.000 | Rp 12.500 | Rp 8.500 |
| | | - KECIL (ARTHERUN) | Rp 200.000 | Rp 30.000 | Rp 100.000 | Rp 70.000 |
| | | - BESAR (KISTA) | Rp 1.800.000 | Rp 600.000 | Rp 900.000 | Rp 300.000 |
| | | - KATARAK | Rp 1.800.000 | Rp 600.000 | Rp 900.000 | Rp 300.000 |
| | | - ENTROPION | Rp 750.000 | Rp 250.000 | Rp 350.000 | Rp 150.000 |
| | | - PTERIGIUM | Rp 500.000 | Rp 150.000 | Rp 250.000 | Rp 100.000 |
| 10 | PERIZINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN | - IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM | Rp 300.000 | Rp 50.000 | Rp 125.000 | Rp 125.000 |
| | | - IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI | Rp 300.000 | Rp 50.000 | Rp 125.000 | Rp 125.000 |
| | | - IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS | Rp 400.000 | Rp 70.000 | Rp 175.000 | Rp 155.000 |
| | | - IZIN BERKELOMPOK DOKTER UMUM | Rp 800.000 | Rp 150.000 | Rp 375.000 | Rp 275.000 |
| | | - IZIN BERKELOMPOK DOKTER GIGI | Rp 800.000 | Rp 150.000 | Rp 375.000 | Rp 275.000 |
| | | - IZIN BALAI PENGOBATAN (BP) | Rp 650.000 | Rp 120.000 | Rp 300.000 | Rp 230.000 |
| | | - IZIN RUMAH BERSALIN (RB) | Rp 1.050.000 | Rp 200.000 | Rp 500.000 | Rp 350.000 |
| | | - IZIN KLINIK RAWAT INAP PELAYANAN MEDIK DASAR | Rp 2.050.000 | Rp 400.000 | Rp 1.000.000 | Rp 650.000 |
| | | - IZIN KELOMPOK DOKTER SPESIALIS | Rp 1.550.000 | Rp 300.000 | Rp 750.000 | Rp 500.000 |
| | | - IZIN KELOMPOK DOKTER GIGI SPESIALIS | Rp 1.550.000 | Rp 300.000 | Rp 750.000 | Rp 500.000 |
| | | - IZIN LABORATORIUM KLINIK PRATAMA | Rp 800.000 | Rp 150.000 | Rp 375.000 | Rp 225.000 |
| | | - IZIN OPTIKAL | Rp 550.000 | Rp 100.000 | Rp 250.000 | Rp 200.000 |
| | | - IZIN TUKANG GIGI | Rp 150.000 | Rp 20.000 | Rp 50.000 | Rp 80.000 |
| | | - SURAT TERDAFTAR PENGOBATAN TRADISIONAL | Rp 150.000 | Rp 20.000 | Rp 50.000 | Rp 80.000 |
| | | - REKOMENDASI MENDIRIKAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH/ SWASTA KELAS C DAN KELAS D | Rp 200.000 | Rp 30.000 | Rp 75.000 | Rp 95.000 |
| | | - IZIN MENDIRIKAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT PEMERINTAH/ SWASTA KELAS C DAN KELAS D | Rp 300.000 | Rp 50.000 | Rp 125.000 | Rp 125.000 |
| | | - IZIN PRAKTEK BIDAN | Rp 250.000 | Rp 40.000 | Rp 100.000 | Rp 110.000 |
| | | - IZIN PRAKTEK PERAWAT | Rp 250.000 | Rp 40.000 | Rp 100.000 | Rp 110.000 |
| | | - IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK KELAS C | Rp 1.550.000 | Rp 300.000 | Rp 750.000 | Rp 500.000 |
| | | - IZIN OPERASIONAL RUMAH MAKAN/ RESTORAN/ LESEHAN | Rp 450.000 | Rp 50.000 | Rp 300.000 | Rp 100.000 |
| | | - IZIN DEPOT AIR MINUM | Rp 300.000 | Rp 50.000 | Rp 150.000 | Rp 100.000 |
| | | - PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-PIRT) | Rp 300.000 | Rp 50.000 | Rp 150.000 | Rp 100.000 |

II TARIF BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD) PERKANTONG

- 1 Produk darah Whole Blood (WB / Darah Lengkap)
- 2 Produk Komponen darah Packed Red Cell (PRC / Sel Darah Merah Pekat)
- 3 Produk Komponen darah Trombocyte Concentrate (TC / Trombosit Pekat)

| NO | JENIS PELAYANAN | JASA SARANA (Rp.) | JASA PELAYANAN | JUMLAH BPPD (Rp.) |
|---|---|-------------------|----------------|-------------------|
| A | PEMERIKSAAN KESEHATAN & LABORATORIUM CALON DONOR | | | 149.400 |
| 1 | Obyek Glas | 35.000 | 700 | 850 |
| 2 | Blood Lanced | 600.000 | 1.000 | 1.250 |
| 3 | Kapiler HT + Heparin | 55.000 | 650 | 800 |
| 4 | Strip Hb. | 240.000 | 20.000 | 25.000 |
| 5 | Kartu Gol. Darah | 1.000 | 1.000 | 1.250 |
| 6 | Antisera Gol.darah ABO | 220.000 | 2.200 | 2.750 |
| 7 | Antisera Gol.darah RH | 200.000 | 2.000 | 2.500 |
| 8 | Kartu Donor Darah | 200.000 | 2.000 | 2.500 |
| 9 | Larutan K3 EDTA | 335.000 | 2.000 | 2.500 |
| 10 | Tabung 12 X 75 mm + Tutup | 200.000 | 2.000 | 2.500 |
| 11 | Reagen HBsAg | 24.000 | 19.000 | 23.750 |
| 12 | Reagen HCV | 29.000 | 24.000 | 30.000 |
| 13 | Reagen HIV | 32.000 | 22.000 | 27.500 |
| 14 | Reagen Sifilis / Anti TP | 31.000 | 21.000 | 26.250 |
| | | 119.550 | 29.850 | 99.975 |
| B | PENYADAPAN DARAH DONOR | | | 99.975 |
| 15 | Setiker (ATK) kantong darah | 2000 | 1.000 | 1.550 |
| 16 | BHP penyadapan darah | 4000 | 1.500 | 2.325 |
| 17 | Kantong Darah Double bag vol. 350 ml | 45.000 | 59.000 | 91.450 |
| 18 | Penyimpanan rantai dingin | | 3.000 | 4.650 |
| | | 64.500 | 35.475 | 25.625 |
| C | SERVICE KOMSUMSI & VITAMIN PENDONOR | | | 25.625 |
| 19 | Multivitamin | 4.490 | 4.000 | 5.000 |
| 20 | Telur rebus (setara) | 2.000 | 2.000 | 2.500 |
| 21 | Susu Instant kotak (sejenis) | 5.000 | 7.000 | 8.750 |
| 22 | Air mineral botol vol. 350 ml | 2.000 | 2.500 | 3.125 |
| 23 | Biskuit (sejenis) | 2.500 | 5.000 | 6.250 |
| | | 20.500 | 5.125 | 275.000 |
| JUMLAH BPPD YANG DISETOR KE UTD OLEH BDRS | | | | |
| JUMLAH BIAYA PENGGANTI PERKANTONG DARAH, SETELAH DI UJI SARING THD | | | | 275.000 |
| PENY. INFEKSI MENULAR LEWAT TRANSFUSI DARAH (UTD KE BANK DARAH) | | | | |
| D | UJI COCOK SERASI DARAH PASIEN & DONOR | | | 89.000 |
| 24 | Blood Grouping Plates | 34.000 | 1.700 | 5.580 |
| 25 | Antisera Gol.darah ABO | 220.000 | 2.200 | 3.480 |
| 26 | Antisera Gol.darah RH | 200.000 | 2.000 | 3.800 |
| 27 | Reagen Dihent | 1.500.000 | 3.000 | 4.200 |
| 28 | Liss Coombs | 50.000 | 45.300 | 69.420 |
| 29 | Yellow Tips | 200.000 | 300 | 420 |
| 30 | Kartu Label hasil uji serasi | 2.000 | 1.500 | 2.100 |
| | | 56.000 | 33.000 | 46.000 |
| E | PENYIMPANAN, PENGOLAHAN & DISTRIBUSI DARAH | | | 46.000 |
| 31 | Pembuatan komponen darah | 20.000 | 14.000 | 22.000 |
| 32 | Packing darah (rantai dingin) | 10.500 | 4.000 | 6.500 |
| 33 | Pengantaran darah | 14.000 | 10.000 | 16.000 |
| 34 | Labelisasi distribusi darah | 2.000 | 1.000 | 1.400 |
| | | 29.000 | 17.000 | 135.000 |
| JUMLAH BPPD YANG DIKELOLA OLEH BDRS | | | | |
| JUMLAH BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH SIAP TRANSFUSI | | | | 410.000 |
| TOTAL BPPD PERKANTONG (UTD + BDRS) | | | | |

BUPATI LOMBOK TENGAH,

TTD

H. MOH. SUHALI FT

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

| NO | JENIS | BESARNYA (Rp) | KETERANGAN |
|--------------|--|------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | KELOMPOK PERUMAHAN | | (Dipungut tiap bulan) |
| 1 | Rumah Besar | 5.000 | Luas diatas 100 m2 |
| 2 | Rumah Sedang | 3.000 | Luas 54 – 100 m2 |
| 3 | Rumah Kecil | 2.000 | Luas 54 m2 kebawah |
| II | KELOMPOK PENGINAPAN | | (Dipungut tiap bulan) |
| 1 | Asrama Yayasan Sosial | 4.000 | |
| 2 | Asrama/Mess | 75.000 | |
| 3 | Hotel/Wisma | 150.000 | Kelas Melati |
| 4 | Hotel/Wisma | 250.000 | Bintang 1 dan 2 |
| 5 | Hotel/Wisma | 500.000 | Diatas Bintang 2 |
| 6 | Pondokan/Home Stay | 100.000 | |
| III. | KELOMPOK RUMAH MAKAN | | (Dipungut tiap bulan) |
| 1 | Rumah Makan Kecil | 7.500 | Kelas C – B |
| 2 | Restoran/Rumah Makan Besar | 100.000 | Kelas A |
| 3 | Warung | 4.000 | Kelas D – E |
| IV. | KELOMPOK PERKANTORAN | | (Dipungut tiap bulan) |
| 1 | Instansi Pemerintah dan ABRI tingkat Kecamatan/Kelurahan | 5.000 | |
| 2 | Instansi Pemerintah dan ABRI tingkat Kabupaten | 10.000 | |
| 3 | Unit Kerja/Bangunan/Satuan Kerja tingkat Kabupaten | 5.000 | |
| 4 | Instansi Swasta/BUMN/BUMD | | |
| | - Tingkat Kabupaten | 50.000 | |
| | - Tingkat Kecamatan | 30.000 | |
| 5 | Rumah Sakit Umum Pemerintah | 250.000 | |
| 6 | Rumah Sakit Umum Swasta | 250.000 | |
| 7 | Puskesmas | | |
| | - Rawat inap | 10.000 | |
| | - Tanpa rawat inap | 5.000 | |
| 8 | Klinik Bersalin | 150.000 | |
| 9 | Praktek Dokter | 150.000 | |
| V. | KELOMPOK LEMBAGA PENDIDIKAN | | (Dipungut tiap bulan) |
| 1. | TK/SD/MI Negeri/Swasta | 5.000 | |
| 2. | SMP/MTs Negeri/Swasta | 50.000 | |
| 3. | SMA/MA/SMK Negeri/Swasta | 50.000 | |
| 4. | Perguruan Tinggi | 50.000 | |
| VI. | KELOMPOK TERMINAL | | (Dipungut tiap bulan) |
| | Terminal Bus | | |
| | - Kabupaten | 150.000 | |
| | - Kecamatan | 100.000 | |
| VII. | KELOMPOK TEMPAT HIBURAN | | (Dipungut tiap ada kegiatan) |
| | Bioskop | 10.000 | |
| | Tempat hiburan temporer yang komersial | 15.000 | |
| VIII. | KELOMPOK PEDAGANG | | (Dipungut tiap bulan) |
| | Pedagang di pasar | | |
| | a. Bakulan tetap | 5.000 | |
| | b. Pakai meja/gerobak | 10.000 | |
| | c. Pedagang temporer pada acara tertentu | 10.000 | |
| | d. Toko dalam kawasan pasar | 10.000 | |
| | Pedagang Kaki Lima | 10.000 | |

| | | | |
|------------|----------------------------------|--------|-----------------------|
| | Pertokoan | | |
| | a. Toko bahan bangunan/meubelair | 15.000 | |
| | b. Toko kelontong | 7.500 | |
| | c. Toko barang pecah belah/kaca | 9.000 | |
| | d. Toko elektronik | 15.000 | |
| | e. Toko buku | 6.000 | |
| | f. Grosir | 15.000 | |
| | g. Toko kendaraan/mesin | 30.000 | |
| | h. Toko obat | 7.000 | |
| | i. Apotek | 15.000 | |
| | j. Kios | 3.000 | |
| | k. Toko besar/swalayan | 5.000 | |
| IX. | KELOMPOK PERTUKANGAN | | (Dipungut tiap bulan) |
| | Tukang jahit | 5.000 | |
| | Tukang cukur | 5.000 | |
| | Tukang las/ketok/karoseri/bubut | 10.000 | |
| | Bengkel roda dua | 5.000 | |
| | Bengkel roda empat | 30.000 | |
| | Tukang kayu/meubelair | 10.000 | |
| | Pabrik industri | 15.000 | |
| | Tukang emas | 5.000 | |
| | Salon kecantikan | | |
| | - Kelas A (> 4 kursi) | 15.000 | |
| | - Kelas B (1 s/d 4 kursi) | 10.000 | |
| X. | KELOMPOK PERGUDANGAN | | (Dipungut tiap bulan) |
| | Gudang besar (> 200 m2) | 50.000 | |
| | Gudang kecil (s/d 200 m2) | 25.000 | |
| XI. | KELOMPOK USAHA-USAHA LAIN | | (Dipungut tiap bulan) |
| | Travel/biro perjalanan | 5.000 | |
| | Rent car | 5.000 | |
| | Percetakan | 10.000 | |
| | Peternakan | 10.000 | |
| | Rumah potong hewan | 25.000 | |
| | Kebun bibit/bunga | 2.500 | |
| | Usaha hasil bumi | 25.000 | |
| | Usaha barang bekas | 25.000 | |
| | Penyewaan VCD/Play Station | 5.000 | |
| | Laboratorium | 20.000 | |
| | SPBU | 25.000 | |
| | Konveksi | 10.000 | |
| | Sablon | 10.000 | |
| | Wartel | 7.000 | |
| | Studio Photo | 15.000 | |

BUPATI LOMBOK TENGAH,

TTD

H. MOH. SUHAILI FT

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

| No | Uraian | Tarif | Keterangan |
|-----------|---|---------------|------------|
| A. | Ret. Pengujian Pertama Kali | | |
| 1. | Mobil Penumpang | Rp. 50.000,- | |
| 2. | Mobil Bus | | |
| | - Bus Kecil (9 s/d 19 Set) | Rp. 55.000,- | |
| | - Bus Sedang (20 s/d 30 Set) | Rp. 60.000,- | |
| | - Bus Besar (31 s/d 40 Set) | Rp. 65.000,- | |
| | - Diatas 40 Set | Rp. 70.000,- | |
| 3. | Mobil Barang, Kend.Khusus | | |
| | a. JBB s/d 2.500 Kg | Rp. 60.000,- | |
| | b. JBB 2.501 kg s/d 5.000 kg | Rp .65.000,- | |
| | c. JBB 5.001 kg s/d 10.000 kg | Rp. 70.000,- | |
| | d. JBB 10.001 kg s/d 20.000 kg | Rp. 75.000,- | |
| | e. 20.001 kg keatas | Rp. 80.000,- | |
| B. | Retribusi Pengujian Berkala | | |
| 1. | Mobil Penumpang | Rp. 50.000,- | |
| 2. | Mobil Bus | | |
| | - Bus Kecil (1 s/d 12 kursi) | Rp. 45.000,- | |
| | - Bus Sedang (13 s/d 24 kursi) | Rp. 50.000,- | |
| | - Bus Besar (25 s/d 40 kursi) | Rp. 55.000,- | |
| | - Bus (tempat duduk di atas 41 orang) | Rp. 60.000,- | |
| 3. | Mobil Barang, Kendaraan Khusus : | | |
| | - JBB s/d 2.500 Kg | Rp. 40.000,- | |
| | - JBB 2.501 kg s/d 5.000 kg | Rp. 50.000,- | |
| | - JBB 5.001 kg s/d 10.000 kg | Rp. 60.000,- | |
| | - JBB 10.001 s/d 20.000 kg | Rp. 70.000,- | |
| | - 20.001 kg keatas | Rp. 80.000,- | |
| C. | Pemasangan Tanda uji/penggantian karena hilang/rusak | | |
| | - Biaya Tanda Samping | Rp. 10.000 | |
| | - Penerbitan Kartu Uji Reguler | Rp. 15.000 | |
| D. | Penghapusan | | |
| | Mobil Penumpang | Rp. 100.000,- | |
| | Mobil Bus | Rp. 130.000,- | |
| | Mobil Barang, Kend. Khusus Kereta gandengan/Tempelan,Tractor Head,Kend.Angkutan Berat | Rp. 150.000 | |

BUPATI LOMBOK TENGAH,

TTD

H. MOH. SUHAILI FT

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

PERHITUNGAN RETRIBUSI MENARA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jumlah Total Menara

230 menara

Retribusi terhutang = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi

Tarif Retribusi diperhitungkan dari Biaya Operasional, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Modal

A. Biaya Operasional

| DESKRIPSI | BIAYA (Rp) | SATUAN | BANYAK | JUMLAH/Bulan (Rp) | KETERANGAN |
|---|------------|---------------|---------|-------------------|--|
| Honorarium Petugas Survey | 500.000 | Bulanan/orang | 8 orang | 4.000.000 | 1 bulan = 22 hari kerja. 1 tim terdiri dari 8 orang. |
| Honor pengawas | 500.000 | Bulanan/tim | 5 orang | 2.500.000 | |
| Transportasi | 150.000 | Harian/tim | 22 hari | 3.300.000 | |
| Uang Makan | 150.000 | Harian/tim | 22 hari | 3.300.000 | |
| Alat Tulis Kantor | 1.000.000 | Bulanan/tim | 1 bulan | 1.000.000 | |
| Total Biaya Pengeluaran per tim per bulan | | | | 14.100.000 | |

B. Biaya Pemeliharaan

| DESKRIPSI | BIAYA (Rp) | SATUAN | BANYAK | JUMLAH/tahun (Rp) | KETERANGAN |
|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------|------------|
| Service Kendaraan | 10.000.000 | per tahun | 1 | 10.000.000 | |
| Alat Survey | 4.000.000 | per tahun | 1 | 4.000.000 | |
| Peralatan kantor | 5.000.000 | per tahun | 1 | 5.000.000 | |
| | 19.000.000 | | | 19.000.000 | |

C. Biaya Modal

| DESKRIPSI | BIAYA (Rp) | SATUAN | BANYAK | JUMLAH/tahun (Rp) | KETERANGAN |
|--|-------------|-----------|--------|--------------------|------------|
| Pembuatan Sistem Informasi Pengendalian Menara | 150.000.000 | per tahun | 1 | 150.000.000 | |
| Pembuatan dan Pemasangan Papan Identitas | 230.000.000 | per tahun | 1 | 230.000.000 | |
| Stiker Retribusi Menara | - | per tahun | 1 | | |
| | | | | 380.000.000 | |

| DESKRIPSI | KAPASITAS PENGAWASAN PER TIM/HARI | JUMLAH HARI KERJA PER BULAN | KAPASITAS PENGAWASAN PERTIM/BULAN | PENGAWASAN PER TIM/BULAN /Menara RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA (Rp) | PENGAWASAN PER TIM/Tahun/Menara RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA (Rp) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara | 3 MENARA | 22 | 66 menara | 213.636 | 2.563.636 |
| Total Rata Rata Biaya Operasional | | | 230 menara | 49.136.364 | 589.636.364 |

$$\text{rumus TDt} = \frac{\text{Bot}+1 + \text{BPt}+1 + \text{BKt}+n}{\text{PDt}}$$

di mana :

TDt Tarif dasar untuk tahun t

BO_{t+1} Biaya operasi di tahun mendatang yang digunakan untuk perhitungan harga/tarif dasar di tahun t

BP_{t+1} Biaya pemeliharaan di tahun mendatang yang digunakan untuk perhitungan harga / tarif di tahun t

BK_{t+n} Biaya konstruksi / modal di tahun mendatang yang digunakan untuk perhitungan harga / tarif dasar di tahun t.

PDt Jumlah menara yang dipergunakan untuk perhitungan harga /tarif dasar di tahun t;

Sehingga Perhitungan Tarif Dasar tersebut adalah:

BO_{t+1} 589.636.364

BP_{t+1} 19.000.000

BK_{t+n} 380.000.000

Total Biaya

Pengendalian 988.636.364

TDt 230

TDt (Rp/ menara) **4.298.419**

BUPATI LOMBOK TENGAH,

TTD

H. MOH. SUHALI FT

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Struktur dan besarnya tarif retribusi alat pemadam kebakaran

- A. Alat Pemadam Kebakaran jenis Dry Powder (serbuk Kering) Gas CO2, Poam 2 Galn (cairan) dan Sejenisnya)

| NO | BERAT | GUDANG/BANGUNAN/TAHUN (Rp) | KETERANGAN |
|----|------------|-------------------------------|------------|
| 1 | s/d 1,5 Kg | 2.500,00 | |
| 2 | 2,5 Kg | 3.000,00 | |
| 3 | 3,5Kg | 4.000,00 | |
| 4 | 4,5 Kg | 5.000,00 | |
| 5 | 6 Kg | 6.000,00 | |
| 6 | 9 Kg | 9.000,00 | |
| 7 | 25 Kg | 10.000,00 | |
| 8 | 40 Kg | 13.000,00 | |
| 9 | 60 Kg | 16.000,00 | |
| 10 | 80 Kg | 20.000,00 | |

- B. Alat pemadam kebakaran jenis fire protection (fire hidran, sprinkler dan sejenisnya sebesar Rp. 100.000

BUPATI LOMBOK TENGAH,

TTD

H. MOH. SUHAILI FT